

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk memperhatikan dan mengelola sistem digital dengan baik untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memerhatikan, memperbaiki, dan mengontrol sistem digital agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, administrasi yang lebih efisien, serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai proses administratif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, pengelolaan data, dan komunikasi antar lembaga pemerintah. Dengan demikian, kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.

Transformasi digital dalam sistem pemerintahan dilakukan dengan menerapkan Electronic Government (E-Government) melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 'SPBE' (Kencono dkk., 2024). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020). Di era digitalisasi pada saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan sekaligus tantangan besar bagi pemerintah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui SPBE adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, responsif, dan adaptif serta untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit pelaksana untuk menghasilkan birokrasi pemerintahan yang integratif, transparan, dan inovatif (Kencono dkk., 2024)..

Dalam mendukung keberhasilan penerapan Electronic Government (E-Government) di instansi pemerintah perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam hal pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, dan efisien (Samauna, 2022). Pemanfaatan teknologi yang optimal,

memungkinkan pemerintah daerah menerapkan atau mengadopsi inovasi-inovasi yang berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan manajemen administrasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Salah satu contoh instansi pemerintah yang telah menerapkan inovasi berbasis teknologi modern adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2008 Kabupaten Toraja Utara dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja dengan Rantepao Sebagai ibukota kabupaten (sulselprov.go.id, 2019). Dinas Kominfo-SP memegang peranan strategis dalam pengelolaan data dan informasi publik dalam mendukung kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi. Dinas Kominfo-SP memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, seperti merancang, mengelola, dan mengembangkan situs web resmi pemerintah daerah untuk menyebarkan informasi. Selain itu, Dinas Kominfo-SP bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi, memperkuat tata kelola pemerintahan melalui internet, dan memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dan informasi pemerintah secara digital (Rapa' dkk., 2022).

Kabupaten Toraja utara sebagai salah satu daerah yang berupaya menuju pemerintahan digital, telah mulai mengimplementasikan aplikasi digital dalam pengelolaan administrasi kepegawaian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu aplikasi digital yang berhasil di adopsi Kabupaten Toraja Utara khususnya di Dinas Kominfo-SP yaitu aplikasi Presensi Simpegnas yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara. Simpegnas itu sendiri dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam pencatatan kehadiran pegawai dan pengelolaan data-data kepegawaian lainnya (Kristina & Saipul, 2024). Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) atau yang biasa dikenal dengan sebutan "Aplikasi Presensi Simpegnas" adalah sebuah inovasi besar yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan proses administrasi kepegawaian, termasuk pencatatan kehadiran (absensi) pegawai.

Simpegnas mempermudah proses administrasi kepegawaian dengan mengoptimalkan pencatatan kehadiran pegawai, sehingga dalam pengelolaan presensi menjadi lebih transparan, akurat, dan real-time. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Penggunaan dan Penerapan

aplikasi Simpegnas seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Disiplin PNS.

Penerapan aplikasi Simpegnas ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk administrasi manual. Selain itu, Simpegnas memungkinkan pengawasan kehadiran karyawan secara real-time, mempercepat pelaporan, dan memberi manajemen akses yang lebih baik ke data. Untuk keperluan administratif dan evaluasi kinerja, Simpegnas menghasilkan laporan presensi yang lebih akurat dan tepat waktu dengan menggabungkan data presensi dengan data lain seperti cuti, izin, atau lembur (Kristina & Saipul, 2024).

Aplikasi Simpegnas telah di implementasikan di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara sejak Februari 2025 dan berlaku hingga saat ini. Penerapan aplikasi ini sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan kepegawaian yang berfokus pada efisiensi dan transparansi. Sebagai aplikasi yang berbasis web dan terintegrasi dengan layanan Sistem Informasi ASN (SIASN) Simpegnas membantu manajemen kepegawaian dalam berbagai hal seperti perencanaan, pengadaan, kehadiran, dan pemantauan kinerja ASN secara nasional (bkn.go.id, 2025).

Aplikasi ini digunakan khususnya dalam absensi digital berbasis pengenalan wajah yang dapat diakses melalui smartphone, menggantikan sistem absensi manual yang sebelumnya dilakukan. ASN pengguna aplikasi ini melakukan absensi tiga kali sehari (pagi, siang, dan sore) baik di kantor maupun dilapangan adapun jadwal check in di pagi hari pukul 07.30-09.00 WITA, kemudian check in pada siang hari pukul 12.00-13.00 WITA dan check out pukul 14.30-18.00 WITA sehingga meningkatkan akurasi dan disiplin kerja dalam pencatatan kehadiran. Dengan disiplin kerja yang baik, para ASN akan menaati semua tata tertib yang ada, sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan.

Maka dari disiplin kerja tersebut dapat membuat tujuan-tujuan instansi dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Bab VI Penilaian Kerja dan Disiplin pasal 228, 229, dan 230. dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Namun, keberhasilan implementasi aplikasi Simpegnas di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara ini sangat bergantung pada tingkat E-Readiness (kesiapan) dari Aparatur Sipil Negara yang akan mengoperasikan

sistem digital ini. Di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara tingkat E-Readiness ASN belum sepenuhnya diketahui. Hal ini menjadi tantangan atau hambatan dalam penerapan aplikasi Simpegnas karena mencakup kesiapan dari berbagai aspek.

Kesiapan yang dimaksud merupakan kesiapan yang berkaitan erat dengan beberapa aspek penting, seperti aspek finansial untuk mendukung penerapan program E-Government (aplikasi Simpegnas) tersebut dalam segi keuangan, aspek kompetensi pegawai baik dalam penggunaan teknologi secara umum maupun secara khusus terkait dengan program yang diterapkan, aspek ketersediaan infrastruktur teknologi dalam mendukung sarana dan prasarana penerapan program, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kesiapan sebuah instansi pemerintah untuk menerapkan program tersebut (Julianto P dkk., 2022). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Studi ini menyoroti tantangan pada saat pengimplementasian, seperti kebutuhan pelatihan, praktik kerja baru, dan kendala teknis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, di Kabupaten Toraja Utara kendala yang dihadapi pada saat proses pengimplentasian aplikasi Simpegnas yaitu di lihat dari segi infrastruktur hampir seluruh perangkat daerah mengalami masalah server yang kurang stabil, kemudian kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sehingga masih banyak ASN yang kurang memahami penggunaan aplikasi Simpegnas ini, juga masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan adanya kendala dari segi infrastruktur seperti server dan jaringan yang kurang stabil.

Penelitian ini sangat relevan dalam mengkaji aspek terkait sejauh mana kesiapan para pegawai (ASN) di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara telah siap dari sisi digital dalam menggunakan aplikasi tersebut. Simpegnas merupakan inovasi E-Government yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di daerah, dengan aplikasi yang berbasis web dan mobile dapat di akses oleh seluruh ASN untuk berbagai keperluan administrasi, serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik (Untajana dkk., 2025). Penerapan aplikasi Simpegnas ini mendukung terciptanya data ASN yang berkualitas dan mempercepat proses pelayanan pegawai (Kristina & Saipul, 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“E-Readiness ASN Di Dinas Kominfo-Sp Kabupaten Toraja Utara Dalam Penerapan Aplikasi Simpegnas”**. Dengan alasan bahwa peneliti ingin mengkaji bagaimana kesiapan (E-Readiness) yang dimiliki oleh para ASN di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam menggunakan

aplikasi Simpegnas ini yang bahkan belum diketahui secara pasti mengingat kesiapan yang dimiliki oleh para ASN sangat menentukan keberhasilan implementasi teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, bagaimana tingkat kesiapan (E-Readiness) ASN di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam penerapan aplikasi Simpegnas? Mengingat kesiapan ASN merupakan kunci utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dari aplikasi Simpegnas ini.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur tingkat kesiapan ASN di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam penerapan aplikasi Simpegnas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam merancang program pelatihan dan kebijakan pendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, sehingga target tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif dapat tercapai.

I.2 Tinjauan Teori

I.2.1 Konsep E-Government

Pemerintahan berbasis teknologi (E-Government) merupakan proses transformasi hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga lain melalui pemanfaatan teknologi (Ijeoma & Nwaodu, 2013). Secara umum, E-Government dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

World Bank mendefinisikan E-Government sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan institusi pemerintah melalui *Wide Area Network*, dan Internet, Mobile Computing, yang memiliki kemampuan untuk transformasi pelayanan yang lebih baik dari pemerintah kepada masyarakat, dunia bisnis, dan dengan instansi pemerintah lainnya, serta dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kenyamanan, pertumbuhan pendapatan serta pengurangan biaya (Inderasari dkk., 2021). Sedangkan E-Government menurut *Richardus Eko Indrajit* (2004) merupakan suatu mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain dengan kepentingan dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan yang selama ini berjalan. Menurut *Suaedi dan Wardianto* (2010) E-Government ialah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, terdapat kesamaan karakteristik dan makna yang meliputi :

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya internet dan teknologi digital.
- Menyediakan akses terhadap informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
- Menyediakan kualitas layanan publik yang telah berjalan.

Dari sejumlah definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa E-Government adalah wujud pemanfaatan TIK oleh sektor publik untuk membangun mekanisme interaksi yang baru antara pemerintah dengan seluruh stakeholder (masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya). Dengan tujuan menyediakan akses informasi secara luas, layanan publik yang berkualitas serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan penerapan E-Government menuntut adanya pengembangan sistem informasi dan data yang diselaraskan dengan proses birokrasi yang ada, sehingga dengan memanfaatkan TIK akan mendukung berjalannya proses berokrasi secara optimal. Di dalam penerapan E-Government pelayanan yang berikan oleh institusi pemerintah dapat meminimalisir hasil kerja birokrasi dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan berkeadilan bagi masyarakat secara luas. Dengan melihat manfaat yang dihasilkan dari penerapan E-Government maka dapat dikatakan bahwa penerapannya merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

1.2.2 Konsep E-Government Readiness

E-Government Readiness merupakan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat (Majapahit & Hexagraha, 2021). Menurut Wisnujaya dan Surendro (2006), E-Government Readiness analisis kesiapan E-Government dibagi menjadi 2 bidang, yaitu kesiapan E-Government dari sudut pandang pemerintah (Government E-Readiness) dan dari sudut pandang Masyarakat pengguna (User/Citizen E-Readiness) (Susanto, 2016). Faktor-faktor yang berhubungan dengan E-Readiness meliputi faktor ketersediaan (Willingness Factor) dan faktor kapasitas (Capacity Factor). Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan Government E-Readiness yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1 Faktor-faktor E-Government Readiness

No	Faktor	Willingness	Capacity
1	E-Leadership	√	√
2	Culture	√	
3	E-Governance		√
4	Human Resources		√
5	ICT Infrastructure		√
6	Business climate		√

Sumber : (Majapahit & Hexagraha, 2021)

- a) E-Leadership, faktor ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif pimpinan. Faktor ini sangat berpengaruh dengan implementasi E-Government di tingkat pemerintahan daerah.
- b) Culture, faktor ini menyangkut penerimaan individu/aparat pemerintah dalam menggunakan teknologi. Faktor ini sangat penting dalam penerapan E-Government karena penerimaan pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.
- c) E-Governance, aspek yang menyangkut tata Kelola E-Government. Tata Kelola yang efektif dan transparan sangat penting dalam penerapan E-Government.
- d) Human Resources, aspek yang menyangkut kemampuan kognitif dan kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi. Faktor ini juga dapat menunjang keberhasilan implementasi E-Government.
- e) ICT Infrastructure, aspek ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan infrastruktur yang baik juga dapat menunjang keberhasilan implementasi E-government.
- f) Business Climate, aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, regulasi, dan sistem pasar yang berhubungan dengan ketersediaan hardware dan software. Kondisi pasar yang stabil dan regulasi yang jelas sangat penting dalam penerapan E-Government.

I.2.3 Konsep E-Readiness

Konsep E-Readiness digunakan untuk mengukur seberapa besar organisasi dalam menerapkan teknologi informasi yang dapat memberikan petunjuk yang dapat membimbing pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi yang dilakukan (Lestari dkk., 2021). United Nation Development Program mendefinisikan E-Readiness sebagai penilaian kesiapan yang dimaksudkan untuk dalam upaya memandu pengembangan dan memberikan tolak ukur perbandingan dan kemajuan atau peningkatan sehingga dapat ditemukan penyebab atau masalah TIK (Nugroho, 2020). Kesiapan elektronik (E-Readiness) merupakan suatu ukuran kepada kesiapan secara nasional, ekonomi dan

persiapan untuk menerima sebuah manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Kausar dkk., 2022).

E-Readiness merupakan tingkat kesiapan organisasi, individu, ataupun negara dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan hasil yang optimal. Konsep E-Readiness ini, hadir karena masih tingginya tingkat kegagalan E-Government khususnya di negara berkembang. Di dalam penerapan E-Government penilaian E-Readiness pemerintah sangat penting dilakukan karena pemerintah adalah komponen penting dari keseluruhan E-Readiness suatu negara dan merupakan aktor yang menentukan atau menyelidiki kebutuhan E-Readiness suatu negara (Kovavic, 2005).

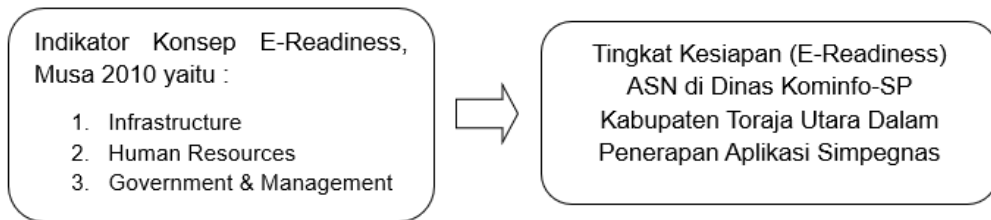
Berdasarkan riset yang dilakukan Musa (2010) tentang alat penilaian e-Readiness untuk regional pemerintah daerah di Iraq menawarkan sebuah metode pengukuran E-Readiness (Windy, 2022). Model E-Readiness ini dapat memberikan hasil pengukuran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pengambil keputusan untuk memilih kebijakan apa yang tepat dan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan E-Readiness (Nugroho, 2020). Berdasarkan hasil analisis, Musa (2010) mengidentifikasi sejumlah indikator yang dapat dikembangkan pemerintah daerah di negara-negara berkembang yang dapat menjadi saran bagi pemerintah daerah untuk menilai E-Readiness di daerah mereka.

Dari banyaknya alat ukur E-Readiness yang ada, di dalam penelitian ini peneliti memilih konsep pengukuran yang dikembangkan oleh Musa (2010) yang menjelaskan tiga indikator E-Readiness. Menurut peneliti indikator yang dijabarkan Musa (2010) sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti yaitu kesiapan (E-Readiness) ASN di pemerintahan daerah khususnya di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara.

Adapun tiga indikator atau konsep pengukuran yang dikembangkan oleh Musa (2010) yaitu :

- Infrastructure
- Human Resources
- Government & Management

Gambar I.2 Kerangka Berpikir



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

I.2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan perbandingan penting untuk mendukung penelitian ini :

- Penelitian oleh Sandy Sumitomo (2024), dengan judul “E-Readiness Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Dalam Implementasi E-Kinerja”. Fokus penelitian ini pada tingkat kesiapan (E-Readiness) Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di Kabupaten Gowa terhadap penerapan aplikasi E-Kinerja. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam menerapkan aplikasi E-Kinerja, dengan menggunakan Framework STOPE yang mencakup lima dimensi : Strategi, Teknologi, Organisasi, Manusia, dan Lingkungan (STOPE). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah fokus penelitian, lokasi dan subjek penelitian, objek dan metodologi penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kesiapan dari sisi kelembagaan secara menyeluruh, sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada kesiapan individu (ASN) dan organisasi perangkat daerah dalam mengadopsi Aplikasi Simpegnas.
- Penelitian oleh Mursalin Kadir (2024), dengan judul “E-Readiness Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan E-Government”. Fokus penelitian ini berfokus pada upaya implementasi E-Government dalam meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik di Kota Jayapura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jayapura belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan E-Government karena belum memenuhi indikator pada lima komponen penilaian, yaitu *Enterprise readiness*, *Human resources readiness*, *Information readiness*, *ICT readiness*, dan *External environment readiness*. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah lingkup penelitian, fokus penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan

kesiapan pemerintah daerah secara keseluruhan dalam menerapkan konsep E-Government, dengan cakupan yang luas dari berbagai sektor layanan publik dan proses digitalisasi pemerintahan, sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik meneliti kesiapan ASN di satu instansi, yaitu Dinas Kominfo-SP, dalam mengadopsi Aplikasi Simpegnas sebagai bagian dari digitalisasi sistem kepegawaian.

- Penelitian oleh Wulandari Trisetia Windy (2022), dengan judul "e-Readiness Penerapan Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Pinrang". Penelitian ini berfokus pada kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai bagian dari digitalisasi layanan perizinan usaha. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait kesiapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dalam menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS) sudah cukup baik. Penelitian ini melibatkan 34 pegawai DPMPTSP dan 77 masyarakat pengguna layanan OSS sebagai sampel, menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan persentase nilai yang tinggi pada setiap indikator e-Readiness, yaitu infrastruktur (78,49%), sumber daya manusia (77,79%), serta pemerintah dan manajemen kelembagaan (79,55%). Rata-rata akumulasi nilai setiap indikator adalah 78,61%, yang dikategorikan "sangat siap". Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya beberapa kendala, seperti kualitas jaringan yang rendah di beberapa daerah dan ketidaksiapan beberapa sumber daya manusia di DPMPTSP dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu pada fokus penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengukur persepsi masyarakat dan pegawai DPMPTSP terkait infrastruktur, sumber daya manusia, serta pemerintah dan manajemen kelembagaan dalam penerapan OSS, sedangkan penelitian sekarang lebih kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam menerapkan aplikasi Simpegnas.
- Penelitian Mira Amelia, Daban Kurniansyah, Dewi Noor Ajizah (2024), dengan judul "E-Readiness Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Karawang". Penelitian ini berfokus pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan digitalisasi identitas kependudukan (IKD) yang menysasar pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa meskipun pemerintah daerah sudah siap, partisipasi dan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan agar penerapan IKD dapat berjalan lebih efektif. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang fokus penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu menunjukkan analisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menerapkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sedangkan penelitian sekarang merujuk pada kesiapan ASN di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam pengimplementasian Aplikasi Simpegnas.

I.2.5 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam mengadopsi dan menerapkan aplikasi Simpegnas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan ASN, seperti aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kelembagaan, agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual E-Readiness ASN sebagai dasar evaluasi sekaligus rekomendasi peningkatan penggunaan aplikasi secara efektif. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

- Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang E-Readiness dan penerapan teknologi informasi di instansi pemerintahan, serta memperkaya kajian akademik, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan ASN dalam menggunakan aplikasi pemerintahan berbasis digital. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan model pengukuran E-Readiness ASN yang relevan dengan kondisi daerah teknologi yang digunakan.
- Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam merancang strategi peningkatan kesiapan dan kemampuan ASN untuk memanfaatkan Aplikasi Simpegnas sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan daerah dalam menyempurnakan penerapan aplikasi teknologi informasi berbasis pemerintahan guna mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara lebih tepat sasaran. Penelitian ini juga membantu dalam perencanaan pelatihan dan sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan adaptasi dan kemudahan pengguna teknologi secara berkelanjutan.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2018) Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang terhadap suatu masalah sosial (Radianto et al., 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggunakan dan mengadopsi aplikasi Simpegnas dalam aspek Infrastructure, Human Resources, dan Government & Management.

II.2 Desain Penelitian

Creswell (2018) dalam bukunya *Qualitative Inquiry And Research Design, Choosing Among Five Approaches* menjelaskan beberapa pendekatan kualitatif yaitu fenomenologi, grounded theory, naratif, etnografi, dan studi kasus yang masing-masing memiliki focus dan prosedur berbeda sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus (case study). Bungin (2001) menjelaskan penelitian studi kasus merupakan penelitian empiris yang mengkaji fenomena-fenomena kehidupan nyata. Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki tingkat kesiapan (E-Readiness) ASN di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara dalam konteks penerapan aplikasi Simpegnas. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendalami secara rinci pengalaman, kendala, dan strategi peningkatan E-Readiness ASN di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara.

II.3 Prosedur Penelitian

II.3.1 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dianggap dapat memberikan data atau informasi terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang dapat diolah dengan lebih akurat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala dinas di Dinas Kominfo-SP Toraja Utara
2. ASN/Pegawai pengguna aplikasi Simpegnas di Dinas Kominfo-SP Toraja Utara
3. ASN Pengelola/Penanggungjawab aplikasi Simpegnas di Dinas Kominfo-SP Toraja Utara

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi teknik untuk meningkatkan validitas dan kedalaman data, meliputi :

- Observasi
Menurut Creswell (2013), observasi kualitatif merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana aktivitas yang perilaku manusia. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang di teliti untuk merekam fenomena-fenomena yang terjadi dengan mencatat point-point penting yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana ASN menggunakan aplikasi Simpegnas dalam aktivitas kerjanya sehari-hari.
- Wawancara
Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan satu arah, dengan mempertemukan dua orang untuk saling bertukar informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan melalui tatap muka langsung antara seseorang dengan peneliti untuk dimintai keterangan berdasarkan permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali mengenai pandangan, pengalaman serta kesiapan para ASN dalam menggunakan aplikasi Simpegnas.
- Dokumentasi
Untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, dokumentasi diperlukan untuk menunjang hasil penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, seperti foto yang diambil pada saat melakukan observasi dan wawancara di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Toraja Utara.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses aktivitas mengelola data dengan memilah-memilah dan menyatukan data kedalam sebuah sistematika menjadi satu sehingga dapat dirumuskan dan ditemukan sebuah kesimpulan untuk dapat menjadi gambaran bagi semua pihak. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menjadikan data penelitian yang dihasilkan lebih konkret dan mendalam. Menurut Creswell (2018), teknik analisis data pada metode penelitian studi kasus (case study) harus dilakukan secara rinci dan detail. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data sesuai dengan pedoman yang telah disiapkan. Data-data yang diperlukan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.
2. Reduksi Data
Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan menyaring, menggabungkan atau mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam bentuk tulisan sesuai dengan format yang telah disediakan.
3. Penyajian Data
Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk yang terorganisir. Proses ini melibatkan pengelolaan data setengah jadi dengan alur yang jelas, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk matriks kategorisasi yang sesuai dengan tema yang ada. Selanjutnya tema-tema tersebut dipecahkan menjadi subtema dan diakhiri dengan penyajian temuan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, serta memberikan kode atau coding di masing-masing subtema.
4. Penarikan Kesimpulan
Tahap terakhir dari teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan, berdasarkan data yang telah disajikan seperti jawaban dari narasumber yang menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

II.3.4 Validitas dan Reabilitasi

1. Validitas
Validitas dalam penelitian kualitatif, berfokus pada keakuratan hasil penelitian yang dapat dilihat dari perspektif peneliti, partisipasi, ataupun pembacanya. Validitas dalam penelitian kualitatif tidak sama dengan validitas yang ada di penelitian kuantitatif karena lebih menekankan pada *trustworthiness* (kepercayaan), *authenticity* (otentitas), dan *credibility* (kredibilitas). Uji validitas yang diterapkan pada penelitian ini meliputi :
 - 1) Triangulasi Data
Menurut Moleong (2014), Triangulasi adalah teknik verifikasi keabsahan data dengan membandingkan atau memeriksa data yang telah diperoleh dengan sumber lain diluar data tersebut. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan mencakup :
 - Triangulasi Sumber, yaitu teknik yang dilakukan untuk membandingkan pernyataan subjek dengan informasi dari informasi lain. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan

apakah informasi tersebut sudah valid dari sudut pandang berbagai pihak.

- Triangulasi Metode, yaitu pengecekan keabsahan data dengan membandingkan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti data observasi dengan data wawancara, serta membandingkan data observasi dan data wawancara dengan isi dokumen terkait. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kesesuaian data yang diperoleh selama wawancara dengan kebutuhan penelitian.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Untuk menguji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu melakukan penyajian deskripsi yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya pada saat penyusunan laporan. Dengan cara ini, temuan penelitian akan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, sehingga mereka dapat memutuskan apakah hasil dari penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks lain.

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Moleong (2014), dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan istilah *dependability* atau kebergantungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan. Reliabilitas yang dimaksud mencakup metode yang telah digunakan oleh peneliti untuk mencapai hasil, yang harus ditunjukkan melalui langkah-langkah berikut : menentukan masalah, memasuki lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan, dan kemudian menarik kesimpulan.